

PENGUATAN TATA KELOLA BUMDESA BERBASIS *COLLABORATIVE GOVERNANCE* MELALUI WISATA EDUKASI DI DESA BAGELANAN, KABUPATEN BLITAR

Susilo*¹, Alfons Zakaria², Deni Agus Setyono³, Ajeng Kartika Galuh¹

¹Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

²Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

³Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya

Penulis korespondensi: Susilo, susilo.feb@ub.ac.id

Abstrak

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) berbasis wisata di banyak desa menghadapi tantangan serius pascapandemi COVID-19, terutama terkait lemahnya tata kelola kelembagaan dan koordinasi antaraktor. Desa Bagelenan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi wisata alam dan sejarah melalui Bukit Pertapaan dan Situs Candi Mleri, namun belum terkelola secara optimal setelah pandemi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola BUMDesa melalui penerapan pendekatan *collaborative governance* dengan menjadikan wisata edukasi sebagai instrumen revitalisasi wisata desa. Metode pelaksanaan dilakukan secara partisipatif melalui tahapan identifikasi masalah dan potensi desa, workshop dan diskusi kolaboratif, perancangan konsep wisata edukasi, implementasi pilot project, serta refleksi dan evaluasi awal. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa workshop dan diskusi kolaboratif berperan sebagai tahap *institutional reorientation* yang meningkatkan pemahaman aktor desa mengenai pembagian peran dan arah pengembangan wisata. Implementasi pilot project wisata edukasi membuktikan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dapat diterjemahkan ke dalam praktik pengelolaan wisata yang nyata. Wisata edukasi berpotensi menjadi strategi adaptif dalam revitalisasi wisata desa pascapandemi melalui penguatan nilai edukatif, pelestarian budaya lokal, dan peluang ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: BUMDesa; *Collaborative Governance*; Wisata Edukasi; Desa Wisata; Pengabdian Masyarakat

Abstract

Village-owned enterprises (BUMDesa) managing tourism-based activities face significant challenges in the post-COVID-19 period, particularly related to weak institutional governance and limited coordination among stakeholders. Bagelenan Village, Srengat District, Blitar Regency, has natural and historical tourism potential through Bukit Pertapaan and the Candi Mleri site, yet these assets have not been optimally managed after the pandemic. This community service program aims to strengthen BUMDesa governance by applying a collaborative governance approach and utilizing educational tourism as a revitalization instrument. The implementation method employed a participatory approach through problem and potential identification, collaborative workshops and discussions, educational tourism concept development, pilot project implementation, and initial reflection and evaluation. The results indicate that collaborative workshops functioned as an institutional reorientation phase, enhancing stakeholders' understanding of governance roles and tourism development strategies. The pilot project demonstrates that strengthened institutional capacity can be translated into practical tourism management. Educational tourism shows strong potential as an adaptive strategy for post-pandemic village tourism revitalization by integrating educational value, cultural preservation, and local economic opportunities.

Keywords: BUMDesa; *Collaborative Governance*; Educational Tourism; Village Tourism; Community Service

Sebelum pandemi COVID-19, Bukit Pertapaan Desa Bagelenan sempat berkembang sebagai objek wisata lokal yang cukup ramai dikunjungi masyarakat sekitar, terutama pada akhir pekan dan hari libur. Aktivitas wisata tersebut memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga desa, baik melalui jasa parkir, warung kecil, maupun kegiatan pendukung lainnya. Namun, pandemi COVID-19 menjadi titik balik yang signifikan bagi keberlanjutan aktivitas wisata di desa ini. Pembatasan mobilitas masyarakat, penurunan kunjungan wisatawan, serta melemahnya aktivitas ekonomi menyebabkan wisata Bukit Pertapaan mengalami stagnasi dan akhirnya tidak terkelola secara optimal. Dampak lanjutan dari kondisi ini adalah menurunnya kualitas sarana prasarana, melemahnya koordinasi antaraktor pengelola, serta hilangnya fungsi wisata sebagai sumber pendapatan alternatif masyarakat desa.

Hingga periode pascapandemi, kondisi wisata Bukit Pertapaan belum sepenuhnya pulih. Meskipun secara fisik aset wisata masih ada, namun tidak didukung oleh sistem pengelolaan yang terstruktur, model bisnis yang jelas, serta tata kelola kelembagaan yang kuat. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata pada faktor permintaan wisata, melainkan pada lemahnya integrasi antara potensi wisata dan kelembagaan ekonomi desa, khususnya BUMDesa. Tanpa tata kelola yang memadai, potensi wisata cenderung bersifat sementara dan rentan terhadap guncangan eksternal, seperti krisis kesehatan atau ekonomi.

Dalam konteks tersebut, pendekatan *collaborative governance* menjadi relevan untuk menjawab kompleksitas pengelolaan wisata desa. *Collaborative governance* menekankan pentingnya keterlibatan multi-aktor—pemerintah desa, BUMDesa, kelompok sadar wisata, masyarakat, dan pihak eksternal seperti perguruan tinggi—dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi program pembangunan (Ansell & Gash, 2008). Pendekatan ini dipandang lebih adaptif dibandingkan model pengelolaan yang bersifat sektoral atau top-down, terutama dalam pengembangan wisata berbasis komunitas yang membutuhkan legitimasi sosial dan partisipasi aktif masyarakat.

Selain itu, pengembangan wisata edukasi menawarkan peluang strategis untuk merevitalisasi destinasi wisata yang sempat mengalami stagnasi. Wisata edukasi tidak hanya berorientasi pada hiburan, tetapi juga pada proses pembelajaran kontekstual yang mengintegrasikan aspek sejarah, budaya, dan lingkungan. Dalam konteks Desa Bagelenan, wisata edukasi berpotensi menjadi instrumen untuk menghidupkan kembali Bukit Pertapaan dan Candi Mleri sebagai ruang pembelajaran, sekaligus memperkuat peran BUMDesa sebagai pengelola usaha desa berbasis pengetahuan dan kearifan lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian melalui skema Doktor Mengabdikan bertujuan untuk memperkuat tata kelola BUMDesa di Desa Bagelenan melalui penerapan pendekatan *collaborative governance* dengan menjadikan wisata edukasi sebagai instrumen utama. Artikel ini mendokumentasikan proses, hasil, dan pembelajaran dari penguatan tata kelola tersebut, serta memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan model pengabdian berbasis desa wisata yang berkelanjutan dan replikatif di wilayah perdesaan lainnya.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui skema Doktor Mengabdikan Universitas Brawijaya dengan tujuan memperkuat tata kelola BUMDesa melalui pendekatan *collaborative governance* dan pengembangan wisata edukasi berbasis



komunitas. Metode pelaksanaan dirancang secara partisipatif dan berorientasi pada proses, dengan menekankan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan desa dalam seluruh tahapan kegiatan.

Pendekatan Pengabdian

Pendekatan utama yang digunakan dalam pengabdian ini adalah *collaborative governance*, yaitu suatu mekanisme pengelolaan yang melibatkan berbagai aktor lintas sektor dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi program secara bersama-sama. Pendekatan ini dipilih karena pengelolaan BUMDesa dan wisata desa tidak dapat berjalan efektif jika hanya mengandalkan satu aktor, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah desa, pengelola BUMDesa, kelompok masyarakat, dan pihak eksternal seperti perguruan tinggi. Selain itu, pengabdian ini juga mengadopsi prinsip *community-based tourism*, yang menempatkan masyarakat desa sebagai subjek utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata.

Lokasi dan Peserta Pengabdian

Pengabdian dilaksanakan di Desa Bagelenan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, yang memiliki potensi wisata berbasis alam dan sejarah, namun belum terkelola secara optimal pascapandemi. Subjek pengabdian meliputi:

1. Pengelola Bumdesa,
2. Perangkat Desa,
3. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis),
4. Masyarakat Desa yang Terlibat dalam Aktivitas Wisata, serta
5. Peserta Wisata Edukasi yang Terdiri atas Siswa Sekolah Dasar Kelas 4–6.

Pemilihan subjek tersebut dimaksudkan untuk merepresentasikan aktor-aktor kunci dalam ekosistem tata kelola BUMDesa dan pengembangan wisata edukasi.

Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan yaitu:



Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Tahap pertama adalah identifikasi masalah dan potensi desa, yang dilakukan melalui observasi lapangan dan diskusi awal dengan pemerintah desa serta pengelola BUMDesa. Tahap ini bertujuan untuk memetakan kondisi eksisting tata kelola BUMDesa, tingkat pemanfaatan aset wisata desa, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wisata Bukit Pertapaan dan situs sejarah lainnya.
2. Tahap kedua adalah diskusi terarah dan workshop penguatan tata kelola BUMDesa, yang melibatkan pengelola BUMDesa, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan pemahaman mengenai prinsip tata kelola yang baik, pembagian peran antaraktor, serta pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan usaha desa berbasis wisata. Diskusi juga diarahkan untuk mengidentifikasi peluang integrasi wisata edukasi ke dalam unit usaha BUMDesa.
3. Tahap ketiga adalah perancangan konsep wisata edukasi berbasis *collaborative governance*. Pada tahap ini, tim pengabdian bersama para pemangku kepentingan desa menyusun konsep awal wisata edukasi yang mengintegrasikan aspek pembelajaran sejarah, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Konsep ini dirancang sebagai model awal yang realistis dan sesuai dengan kapasitas desa.
4. Tahap keempat adalah implementasi *pilot project* wisata edukasi, yang dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran kontekstual di lokasi wisata desa, yaitu Bukit Pertapaan dan Situs Candi Mleri. Kegiatan ini melibatkan siswa Sekolah Dasar sebagai peserta utama dan dirancang sebagai contoh konkret produk wisata edukasi yang dapat dikembangkan dan dikelola oleh BUMDesa bersama masyarakat.
5. Tahap kelima adalah refleksi dan evaluasi awal, yang dilakukan melalui diskusi bersama pengelola BUMDesa dan perangkat desa. Evaluasi difokuskan pada proses pelaksanaan, tingkat partisipasi aktor, serta potensi keberlanjutan dan pengembangan program pada tahap selanjutnya.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data dalam kegiatan pengabdian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu observasi partisipatif, diskusi kelompok terarah (FGD), dan dokumentasi kegiatan. Selain itu, refleksi dari pengelola BUMDesa dan peserta kegiatan digunakan sebagai sumber data kualitatif untuk memahami dinamika proses dan hasil pengabdian. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan menekankan pada analisis proses, perubahan pemahaman aktor, serta implikasi penguatan tata kelola BUMDesa melalui wisata edukasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan Kapasitas Kelembagaan BUMDesa melalui Workshop dan Forum Diskusi Kolaboratif

Hasil workshop dan diskusi kolaboratif menunjukkan bahwa persoalan utama pengelolaan wisata di Desa Bagelanan tidak hanya berkaitan dengan menurunnya kunjungan pascapandemi, tetapi juga mencerminkan lemahnya fondasi kelembagaan dalam pengelolaan aset wisata desa. Sebelum pandemi, aktivitas wisata Bukit Pertapaan masih berjalan melalui inisiatif informal masyarakat, namun belum terhubung secara kuat dengan sistem kerja BUMDesa. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan wisata sangat bergantung pada aktor tertentu, belum memiliki pembagian peran yang jelas, dan belum didukung oleh standar operasional maupun perencanaan usaha yang berkelanjutan.



Temuan lapangan tersebut menunjukkan bahwa pandemi berfungsi sebagai titik uji terhadap ketahanan tata kelola wisata desa. Ketika terjadi pembatasan mobilitas dan penurunan kunjungan, kelembagaan pengelola belum memiliki mekanisme adaptasi yang memadai untuk mempertahankan aktivitas wisata. Dengan demikian, stagnasi wisata pascapandemi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat menurunnya permintaan wisata, tetapi juga sebagai konsekuensi dari belum terbangunnya sistem tata kelola BUMDesa yang mampu mengoordinasikan aktor, sumber daya, dan rencana pengembangan wisata secara terintegrasi.



Gambar 1. Diskusi Terarah dan Workshop Penguatan Tata Kelola BUMDes Desa Bagelenan, Kabupaten Blitar

Workshop dan forum diskusi kolaboratif kemudian berperan sebagai ruang konsolidasi awal bagi para aktor desa. Melalui forum ini, pengelola BUMDesa, perangkat desa, Pokdarwis, dan masyarakat mulai mengidentifikasi kembali posisi masing-masing dalam pengelolaan wisata. BUMDesa tidak lagi dipahami hanya sebagai unit usaha administratif, tetapi mulai diarahkan sebagai simpul koordinasi yang menghubungkan potensi wisata, peran masyarakat, dukungan pemerintah desa, serta peluang kerja sama dengan pihak eksternal Susilo (2026).

Dari perspektif tata kelola, perubahan pemahaman tersebut merupakan capaian penting karena pengembangan wisata desa memerlukan mekanisme koordinasi yang lebih kuat dibandingkan pengelolaan berbasis inisiatif individual. Forum kolaboratif membantu memperjelas bahwa revitalisasi wisata Bukit Pertapaan dan Situs Candi Mleri membutuhkan pembagian peran yang lebih terstruktur, mulai dari pengelolaan destinasi, penyusunan paket wisata edukasi, promosi, pendampingan pengunjung, hingga pelibatan pelaku usaha lokal (Bahtiar Fitanto, 2026). Dengan demikian, hasil workshop tidak hanya berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga menjadi dasar awal bagi pembentukan pola tata kelola yang lebih kolaboratif.

Temuan lain yang muncul dalam proses diskusi adalah lemahnya visibilitas destinasi wisata Desa Bagelenan. Bukit Pertapaan dan Situs Candi Mleri memiliki nilai sejarah, budaya, dan lanskap alam yang potensial, tetapi belum dikemas dalam produk wisata yang mudah dikenali oleh calon pengunjung. Rendahnya promosi digital, terbatasnya informasi destinasi, serta belum tersusunnya paket wisata menyebabkan potensi tersebut belum menghasilkan dampak ekonomi yang optimal bagi desa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola BUMDesa tidak hanya menyangkut aspek kelembagaan internal, tetapi juga kemampuan BUMDesa dalam mengelola komunikasi, branding, dan jejaring pasar (Ajun Nimbara, 2026). Dalam

konteks wisata edukasi, BUMDesa perlu berperan sebagai pengelola nilai tambah, yaitu mengubah aset wisata yang sebelumnya bersifat pasif menjadi produk pembelajaran yang dapat ditawarkan kepada sekolah, komunitas, dan pengunjung lokal. Dengan demikian, promosi digital dan penyusunan paket wisata bukan sekadar aktivitas teknis, melainkan bagian dari penguatan fungsi manajerial BUMDesa.

Hasil workshop dan diskusi kolaboratif mengindikasikan bahwa penguatan tata kelola BUMDesa di Desa Bagelanan memerlukan perubahan paradigma pengelolaan, penataan peran kelembagaan, serta perumusan strategi operasional yang terintegrasi. Intervensi workshop berfungsi sebagai tahap reorientasi kelembagaan untuk membangun pemahaman bersama mengenai akar masalah dan arah transformasi tata kelola BUMDesa. Temuan ini menjadi dasar penting bagi implementasi pilot project wisata edukasi, yang dibahas pada subbab berikutnya sebagai bentuk pengujian praktik *collaborative governance* dalam konteks nyata.

Secara keseluruhan, workshop dan diskusi kolaboratif menghasilkan pembelajaran penting bahwa penguatan tata kelola BUMDesa perlu dimulai dari penataan cara pandang aktor desa terhadap aset wisata. Wisata desa tidak cukup diposisikan sebagai lokasi kunjungan, tetapi perlu dipahami sebagai ekosistem usaha yang melibatkan kelembagaan, pembagian peran, produk wisata, promosi, pelayanan, dan keberlanjutan ekonomi lokal. Oleh karena itu, hasil workshop menjadi dasar untuk menguji apakah pemahaman kolaboratif tersebut dapat diterjemahkan ke dalam praktik melalui pilot project wisata edukasi.

Implementasi Pilot Project Wisata Edukasi sebagai Uji Terap Tata Kelola Kolaboratif

Implementasi pilot project wisata edukasi menunjukkan indikasi awal bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dapat diterjemahkan ke dalam praktik pengelolaan wisata yang lebih terkoordinasi. Meskipun masih berskala terbatas, kegiatan ini memberikan pembelajaran penting mengenai pembagian peran antaraktor, kebutuhan penguatan kapasitas pemandu lokal, serta perlunya penyusunan standar layanan wisata edukasi agar BUMDesa dapat mengelola potensi wisata desa secara lebih berkelanjutan.

Pilot project yang melibatkan 15 siswa Sekolah Dasar kelas 4–6 perlu dipahami sebagai uji coba awal, bukan sebagai dasar generalisasi luas. Skala terbatas tersebut justru memungkinkan tim pengabdian dan aktor desa untuk mengamati secara lebih dekat kesiapan kelembagaan, kapasitas pendampingan, kelayakan rute wisata, serta kebutuhan pendukung yang masih harus diperbaiki. Dengan demikian, pilot project ini berfungsi sebagai ruang pembelajaran kelembagaan bagi BUMDesa dan masyarakat dalam mengembangkan wisata edukasi secara bertahap.

Dari sisi tata kelola, kegiatan ini menunjukkan mulai terbentuknya pembagian peran antaraktor. BUMDesa berperan sebagai koordinator kegiatan, perangkat desa memberikan dukungan administratif dan legitimasi, sementara masyarakat terlibat dalam pendampingan lapangan dan penyediaan layanan pendukung. Meskipun masih berada pada tahap awal, pola ini menunjukkan bahwa prinsip tata kelola kolaboratif mulai diterjemahkan ke dalam praktik, terutama dalam bentuk koordinasi, pembagian tanggung jawab, dan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas wisata.

Namun, pelaksanaan pilot project juga memperlihatkan beberapa keterbatasan yang perlu menjadi agenda perbaikan. Fasilitas pendukung wisata edukasi masih terbatas, modul pembelajaran belum tersusun secara sistematis, dan kapasitas pemandu lokal masih perlu ditingkatkan. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola

BUMDesa merupakan proses bertahap yang memerlukan pendampingan lanjutan, penyusunan standar layanan, serta pengembangan kapasitas aktor lokal secara berkelanjutan.



Gambar 3. Pelaksanaan Pilot Project Wisata Edukasi Berkeliling situs Candi Mleri dan Bukit Pertapan di Desa Bagelanan

Dari sisi konten, kegiatan eduwisata dirancang untuk mengintegrasikan narasi sejarah, lingkungan, dan budaya lokal. Di Candi Mleri, peserta diperkenalkan pada nilai historis situs sebagai bagian dari warisan budaya Kabupaten Blitar, sementara di Bukit Pertapaan peserta memperoleh pembelajaran kontekstual mengenai lanskap alam dan sejarah lokal. Hal ini sejalan dengan visi Desa Wisata Bagelanan sebagai desa wisata berbasis budaya dan ekowisata yang berkelanjutan, di mana aktivitas wisata tidak hanya berorientasi pada rekreasi, tetapi juga pada edukasi dan pembentukan kesadaran budaya.

Dari perspektif tata kelola, pilot project menunjukkan mulai berfungsinya pembagian peran antaraktor desa sebagaimana dirumuskan dalam workshop. BUMDesa berperan sebagai koordinator kegiatan, perangkat desa memberikan dukungan administratif dan legitimasi, sementara masyarakat terlibat sebagai pendamping lapangan dan penyedia layanan sederhana. Pola ini mencerminkan praktik awal collaborative governance, di mana pengelolaan wisata tidak didominasi oleh satu aktor, tetapi dijalankan melalui koordinasi dan pembagian tanggung jawab yang relatif jelas.

Namun demikian, implementasi pilot project juga mengungkap sejumlah keterbatasan struktural yang telah diidentifikasi dalam pemetaan akar masalah sebelumnya. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan fasilitas pendukung wisata edukasi, belum tersedianya modul pembelajaran yang terstandar, serta kapasitas pemandu lokal yang masih perlu ditingkatkan. Dalam konteks ini, perlu ditekankan bahwa temuan tersebut tidak dapat dipandang sebagai kegagalan program, melainkan sebagai bagian dari proses pembelajaran sistemik yang justru penting untuk perbaikan tata kelola pada tahap selanjutnya.

Lebih jauh, hasil pilot project mengindikasikan bahwa wisata edukasi berpotensi menjadi instrumen strategis dalam revitalisasi wisata desa pascapandemi. Berbeda dengan model wisata massal yang sangat bergantung pada jumlah kunjungan, wisata edukasi memungkinkan desa mengembangkan produk yang lebih fleksibel, berorientasi kualitas, dan memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi edukatif serta pelestarian budaya. Pendekatan ini membuka peluang bagi BUMDesa untuk membangun model

usaha wisata yang lebih tahan terhadap guncangan eksternal dan lebih sejalan dengan prinsip pembangunan desa berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi pilot project wisata edukasi menunjukkan bahwa hasil penguatan tata kelola melalui workshop dan diskusi kolaboratif dapat diterjemahkan ke dalam praktik pengelolaan wisata yang nyata. Pilot project ini berfungsi sebagai jembatan antara perencanaan dan implementasi, sekaligus sebagai sarana evaluasi awal atas efektivitas tata kelola kolaboratif yang dibangun. Temuan pada subbab ini menegaskan bahwa penguatan BUMDesa berbasis *collaborative governance* memerlukan proses bertahap, di mana pembelajaran dari praktik lapangan menjadi elemen kunci dalam penyempurnaan model pengelolaan wisata desa.

SIMPULAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini menunjukkan bahwa permasalahan utama pengelolaan wisata Desa Bagelanan pascapandemi bukan semata penurunan kunjungan, melainkan lemahnya tata kelola kelembagaan dalam pengelolaan aset wisata desa. Melalui pendekatan *collaborative governance*, kegiatan pengabdian berhasil memperkuat peran BUMDesa sebagai simpul koordinasi pengelolaan wisata dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait. Workshop dan diskusi kolaboratif berfungsi sebagai tahap *institutional reorientation* yang membangun pemahaman bersama mengenai akar masalah, pembagian peran, serta arah pengembangan wisata desa yang lebih terstruktur dan adaptif.

Implementasi pilot project wisata edukasi membuktikan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dapat diterjemahkan ke dalam praktik pengelolaan wisata yang nyata. Wisata edukasi terbukti memiliki potensi sebagai strategi revitalisasi wisata desa pascapandemi karena menggabungkan nilai edukatif, pelestarian budaya lokal, dan peluang ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, pengabdian ini menegaskan bahwa pengembangan wisata desa yang berkelanjutan memerlukan tata kelola kolaboratif yang tidak hanya meningkatkan kapasitas kelembagaan, tetapi juga diuji melalui implementasi langsung di lapangan sebagai dasar pembelajaran dan penyempurnaan model pengelolaan BUMDesa ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajun Nimbara. (2026). *Menuju Desa Wisata Bagelanan: Visi, strategi, dan penguatan daya saing berbasis budaya dan ekowisata* [Paparan workshop PKM–Doktor Mengabdi]. Universitas Brawijaya, Blitar.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. (2025). *Kecamatan Srengat dalam Angka 2025*. Blitar: BPS Kabupaten Blitar. <https://blitarkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/1c69c1357905c69703188b02/kecamatan-srengat-dalam-angka-2025.html>



- Bahtiar Fitanto. (2026). *Pengembangan eduwisata Desa Bagelenan berbasis Market Systems Development (M4P)* [Paparan workshop PKM–Doktor Mengabdi]. Universitas Brawijaya, Blitar.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2022). *Pengembangan dan evaluasi BUM Desa*. Jakarta.
- Susilo. (2026). *Penguatan tata kelola BUMDesa berbasis collaborative governance melalui wisata edukasi* [Paparan workshop PKM–Doktor Mengabdi]. Universitas Brawijaya, Blitar.